

Rahmah Ningsih, S.H.I., MA. Hk



Modul Pembelajaran Online 10

Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi



E-Learning

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TAHUN 2018

BAB VI

SEJARAH DAN DINAMIKA

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Rahmah Ningsih, S.H.I., MA. Hk

A. Sejarah singkat Pancasila sebagai sistem etika

1. Aspek historis

Pancasila sebagai sistem etika pada era orde lama berbentuk sebagai pandangan hidup (*Philosophische Grondslag atau Weltanschauung*). Pancasila belum dikategorikan sebagai sistem etika, akan tetapi nilai, norma dan moral bangsa sudah menjadi pandangan hidup dalam bermasyarakat. Masyarakat pada masa orde lama telah mengenal kata “berdikari/berdiri di atas kaki sendiri”. Berdikari merupakan istilah yang dicetuskan oleh Soekarno, merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari sama artinya dengan kemandirian atau tidak memiliki ketergantungan dengan yang lain. Pada prinsipnya berdikari merupakan prinsip di bidang ekonomi. (etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/77788/.../S2-2015-339317-chapter1.pdf, diakses tanggal 10 Agustus 2018, 14-15)

Berdikari dalam bidang ekonomi berarti harus bersandar pada dana dan tenaga yang memang sudah ada dan menggunakannya semaksimalnya. Dalam pemikiran Muhammad Hatta yang menganut pemikiran Mahatma Gandhi-Swaddeshi, mengatakan bahwa ekonomi berdikari mampu menjadi pemicu munculnya semangat bangsa untuk kewirausahaan khususnya di kalangan generasi muda. Nasionalisme ekonomi juga dapat dilihat dari sejarah bangsa Indonesia berupa kemandirian ekonomi dalam persaingan dengan bangsa lain dapat. Kemandirian tersebut dapat mengangkat semangat juang bangsa Indonesia. Contoh nyatanya yaitu Sarikat Islam yang lahir dari persaingan dagang, memiliki nilai-nilai perjuangan ekonomi.

Bung Karno memiliki sosok panutan di bidang kewirausahaan yaitu Niti Semito seorang raja Kretek Kudus yang membangun pabrik rokok Ball Tiga dalam suasana persaingan industri rokok pada masa Penjajahan Belanda. Begitu juga dengan keluarga Mangkunegaran yang membangun bisnis industri gula yang bersaing dengan industri gula milik pengusaha asing yang sudah banyak di Jawa. Peristiwa sejarah seperti ini yang kemudian harus diangkat dan disampaikan kepada generasi muda yang bertujuan untuk membangkitkan semangat kewirausahaan. (Wasino, *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 2017*, Vol. 1 no. 1, 2017, Hal. 8)

Adapun nilai-nilai yang dikembangkan pada awal-awal kemerdekaan lebih diarahkan pada sikap nasionalisme, identitas bangsa dan pembangunan pondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Disebutkan oleh Azyumardi Azra sebagaimana dikutip oleh Yudi Hartono dalam tulisannya bahwa Presiden Soekarno membawa semangat *nation and character building* dalam pendidikan. Soekarno mengatakan bahwa pendidikan ala kolonial yang terlalu intelektualistis harus diganti dengan pendidikan kepribadian, pengembangan kepercayaan diri, pendidikan yang menimbulkan keberanian, inisiatif, dan semangat kerja.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Menteri pendidikan pertama Ki Hajar Dewantara mengeluarkan Instruksi Umum yang menyatakan bahwa pendidikan harus membangun semangat kebangsaan dan semangat patriotisme. Instruksi tersebut ditandai dengan wajibnya sekolah-sekolah mengibarkan bendera Merah Putih di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghentikan pengibaran bendera, lagu kebangsaan, pelajaran dan upacara bala tentara Jepang. Adapun susunan pelajaran masih sangat sederhana dengan terpusat pada pendidikan etika terhadap Negara, yaitu pendidikan watak, dan kesadaran bernegara dan bermasyarakat.

Jika melihat ke sejarah bangsa sebelum kemerdekaan, para tokoh-tokoh bangsa telah merintis pendidikan karakter, pendidikan yang berkaitan dengan etika (nilai, norma dan moral). Ki Hajar Dewantara salah satu pelopor pendidikan karakter telah memikirkan hal tersebut, karena menurutnya kecerdasan budi lebih baik karena dapat membangun kepribadian dan karakter jiwa yang berasaskan hukum.

“...pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita”. (Yudi hartono, Jurnal Agastya, No. 1, Vol. 7, hal. 35-38)

Kemudian pada masa orde baru Pancasila sebagai sistem etika mulai disosialisasikan. Secara formal pemerintah menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui TAP MPR NO II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di sekolah dan di masyarakat. Melalui penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan diinstitutionalkan dalam wadah BP-7 (Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dilaksanakan ke berbagai lapisan masyarakat mulai dari anak sekolah, mahasiswa, PNS, pengusaha sampai kepada pejabat dan mendapatkan sertifikat/piagam. Fungsi dari BP-7 (Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) adalah melakukan fungsi pendidikan serta pengawasan kepada para Penatar sekaligus Petatar. Adapun pemahaman mengenai butir-butir pancasila dari hasil temuan BP-&, yaitu: (Ristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016, 180-181)

Adapun cara pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu:

1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

- a. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemahaman terhadap kata “**percaya**” ini kemudian dimaknai bahwa setiap pemeluk agama dan kepercayaan harus memahami ajaran agama dan melaksanakannya dengan baik dan benar. sehingga pada akhirnya diyakini bahwa etika terhadap ajaran agama dan kepercayaan adalah melaksanakan semua perintah agama dan menjauhi larangannya. Untuk mengetahui hal-hal yang diperintahkan dan dilarang, maka seseorang harus didasarkan pada pengetahuan akan agamanya dan melakukan proses belajar, karena jika tidak maka akan terjadi kesalahan dalam menjalankan perintah Tuhan

- b. Hormat menghormati dan bekerja sama antar para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.

Pemaknaan kata “**bekerja-sama**” ialah setiap pemeluk agama melakukan pekerjaannya bersama-sama, baik sesama agama atau antar umat beragama. Bekerja sama ini tentu harus melalui etika yang benar yaitu dengan cara bermusyawarah dan bersepakat dalam melakukan sesuatu. Terlebih lagi jika kesepakatan tersebut dilakukan dengan antar umat beragama (dalam urusan sosial) sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama.

Contoh: di Indonesia ada organisasi yang menaungi kerukunan antar umat beragama, khususnya yang ada di Jakarta di Ketua oleh Prof. Dr. Ahmad Syafii Mufid.



Gambar: <http://www.satuharapan.com>



Gambar: <https://www.jurnalhusantara.com/>

- c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain

2) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

- a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Contoh: memperlakukan orang lain tanpa sifat membeda-bedakan. Seorang dokter dalam memperlakukan pasiennya, harus sama dengan tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan status sosialnya.

- b. Saling mencintai sesama manusia
 - c. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
 - d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
 - f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
- 3) Sila Persatuan Indonesia
- a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 - b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
 - c. Cinta tanah air dan bangsa.
 - d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
 - e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka tunggal ika.
- 4) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
- a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
 - b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - e. Dengan itikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah.
 - f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 - g. Putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- 5) Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - b. Bersikap adil.
 - c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - d. Menghormati hak-hak orang lain.
 - e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain
 - f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
 - g. Tidak bersifat boros.

- h. Tidak bergaya hidup mewah.
- i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
- j. Suka bekerja keras.
- k. Menghargai hasil karya orang lain.
- l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Selain sosialisasi nilai Pancasila dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, dalam kegiatan penataran juga disampaikan pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Walaupun pada akhirnya kegiatan tersebut nyaris berhenti pada era reformasi 1998. Hal tersebut disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap produk yang dihasilkan.

Produk yang telah dilaksanakan oleh Orde baru ditiadakan. Bahkan, lembaga yang menyelenggarakan penataran P4 seperti Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) berubah fungsi, Depdiknas tidak menyelenggarakan penataran P4 di sekolah dan Perguruan Tinggi, apalagi organisasi sosial masyarakat dan pemuda. Sebagai gantinya, sekarang Kemendiknas melaksanakan Program Pendidikan Karakter.

Program pendidikan karakter juga menuai kritik, karena dianggap untuk membangun karakter dari pintu pendidikan harus dilakukan secara komprehensif-integral, tidak hanya melalui pendidikan formal, namun juga melalui pendidikan informal dan non formal. Selama ini, ada kecenderungan pendidikan formal, informal dan non formal, berjalan terpisah satu dengan yang lainnya. Akibatnya, pendidikan karakter seolah menjadi tanggung jawab secara parsial. (Suroso, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, No. 2, Agustus, 2011, 11-12)

2. Aspek Sosiologis

Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat di berbagai etnik di Indonesia. Sumber ini berasal dari mutiara kearifan lokal yang ada di masyarakat. Indonesia kaya akan kearifan lokal, yang merupakan suatu gagasan masyarakat setempat yang penuh kearifan dan bernilai baik sehingga tetap tertanam dan diikuti oleh suatu kelompok masyarakat. Adapun contoh ungkapan-ungkapan dari kearifan lokal yang ada di Indonesia, seperti;

- ii. Lamak dek awak, katuju dek urang
 Pepatah ini merupakan salah satu ungkapan dalam petuah minangkabau yang mengajarkan kita tentang tenggang rasa. *Lamak dek awak* berarti bagi kita enak, dan *katuju dek urang* berarti bisa diterima oleh orang lain. Singkatnya sama-sama enak, baik bagi kita maupun bagi orang lain.



Buya Hamka, Gambar: <http://www.pictame.com/>

c. Filosofi hidup orang Jawa

Beberapa filosofi orang Jawa, diantaranya:

- 1) Sapa nandur, bakalan ngunduh, artinya siapa yang menebarkan kebaikan maka suatu saat akan menuai hasilnya, seseorang yang banyak membantu orang lain maka suatu hari ia akan mendapatkan banyak kebaikan. Manusia dianjurkan untuk selalu berbuat baik di mana pun berada
- 2) Nerima ing pandum, artinya manusia sangat dianjurkan untuk menerima secara ikhlas dalam menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup.
- 3) "Pring Kuning, urip iku eling wajib podo eling marang sing peparing" artinya hidup harus selalu ingat pada Sang Maha Pengasih.



Dosa Pitutur merupakan 10 filosofi Sunan Kalijaga.

Gambar: <http://cahayaberbagi777.blogspot.com>

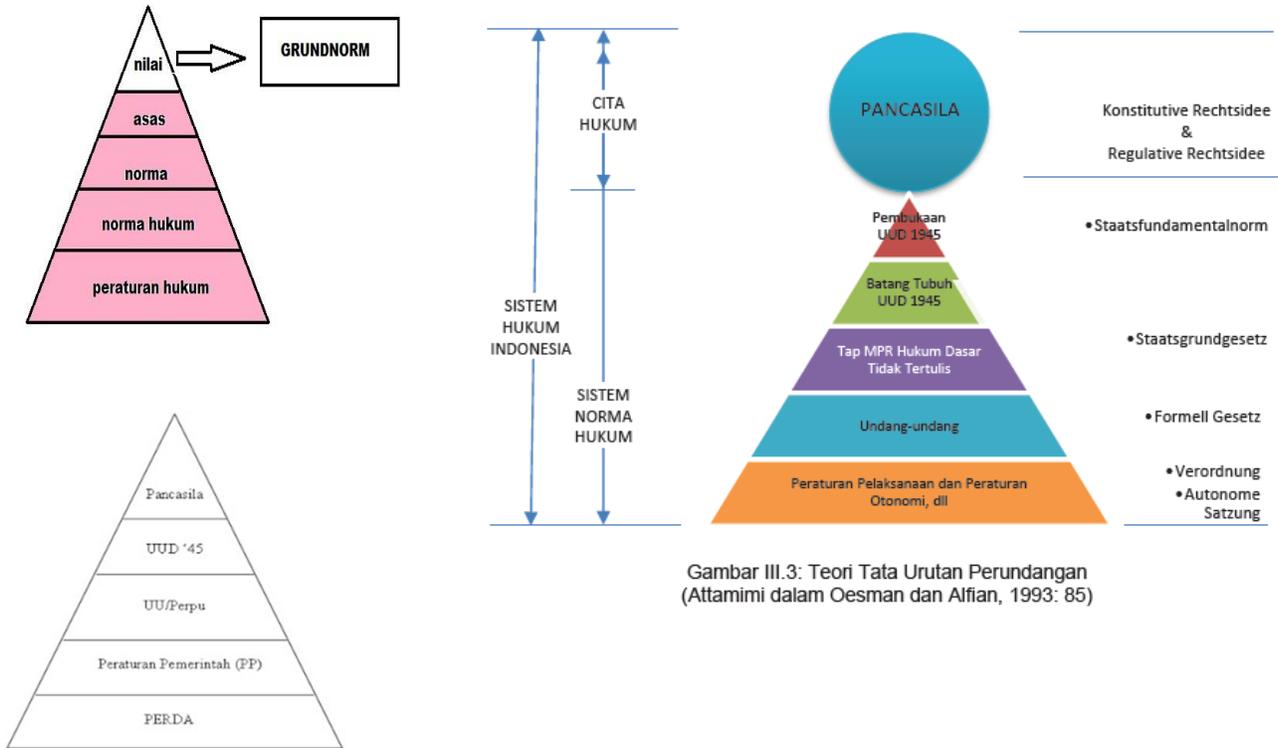
Kemudian kearifan lokal dalam masyarakat juga sangat sangat menghormati alam, karena alam merupakan tempat bergantung hidup yang menjadi sumber nafkah dan sumber kebudayaan. Dalam ungkapan dikatakan “Kalau tidak ada laut, hampalah perut Bila tak ada hutan, binasalah badan”. Ungkapan lain “Kalau binasa hutan yang lebat, rusak lembaga hilanglah adat”. Perilaku interaksi terhadap lingkungan ini merupakan hal yang dikembangkan sebagai manifestasi dan menghargai nilai-nilai di masyarakat. (Thamrin, Jurnal Khutubkhanah, No. 1, Januari 2013, 49)

3. Aspek Politis

Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar (*Grundnorm*) sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkrit norma tersebut. Teori ini dikenal dengan sebutan *hirarchi of norm (strufenbau des recht)*, yang merupakan susunan daripada kaidah-kaidah.

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang dinamik karena hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya. Lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut membentuk peraturan berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang dan berlapis membentuk hirarki di mana norma yang lebih rendah berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi, dan demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Norma yang berada di puncak merupakan kaidah fundamental/ kaidah-kaidah dasar (*Grundnorm*) yang sifatnya abstrak menuju ke hukum yang positif dan seterusnya sampai menjadi nyata. Semua norma merupakan satu kesatuan dengan struktur piramida. Norma yang nyata lebih bersifat individual (*concretenorm*) sedangkan norma positif merupakan perantara (*tussennorm*) dari norma dasar menjadi norma individual. (Ni'matul Huda, Jurnal Hukum Vol.13 No. 1, 2006, hal. 28-30)

Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi (*Grundnorm*) yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkrit. Adapun ilustrasi dari hierarki norma ini, dapat dilihat di bawah ini;



Gambar III.3: Teori Tata Urutan Perundangan (Attamimi dalam Oesman dan Alfian, 1993: 85)

Adapun berkaitan dengan etika politik juga mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri.

- Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan
- Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial
- Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan

Membangun etika politik dapat dimungkinkan melalui dua aspek, yaitu aspek normatif dan penalaran politik. Hal ini ingin menunjukkan budaya politik santun, mengajak untuk berpikir secara kritis, menerima perbedaan. Adapun Hubungan antara dimensi tujuan, sarana, dan aksi politik dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar: Jurnal Unisia no. 58

6) Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Etika

Dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Orde Lama

Pada masa orde lama tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila, bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman orde lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin, yang cenderung otoriter.

2. Orde Baru

Sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P-4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang.

Manusia Indonesia seutuhnya (adalah makhluk mono-pluralis yang terdiri atas susunan kodrat: jiwa dan raga; Kedudukan kodrat: makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri; sifat kodrat: makhluk sosial dan makhluk individual. Keenam unsur manusia tersebut saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia Indonesia menjadi pusat persoalan, pokok dan pelaku utama dalam budaya Pancasila.

3. Era reformasi. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta machiavelisme (menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan). Sofian Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada dalam sambutan pembukaan Simposium Nasional Pengembangan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun tantangan Pancasila sebagai sistem etika yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat.
2. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK (Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi) yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan social karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu.

3. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era Reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi.

Kemudian Pancasila sebagai sistem etika memiliki hakikat di dalam setiap sila-silanya, yaitu antara lain:

1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral, semua tindak tanduk manusia harus berlandaskan dari sumber agama atau kepercayaan yang sumbernya juga langsung dari Tuhan. Setiap perilaku masyarakat wajib berdasarkan etika (nilai, norma dan moral) yang sumbernya berasal dari agama atau kepercayaan masing-masing.
2. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab
Hakikat sila ini ialah bahwa semua perilaku manusia atau masyarakat harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Peduli terhadap sesama, baik berbagi kebahagiaan atau menolong orang lain ketika terkena musibah dan bencana. Sikap inilah yang kemudian seseorang dapat dikatakan memiliki sikap kemanusiaan, karena memiliki nilai empati terhadap orang lain
3. Sila ketiga: Persatuan Indonesia
Hakikat sila ini ialah rela dan memiliki kesediaan untuk hidup bersama walaupun di tengah-tengah perbedaan. Baik perbedaan suku, ras, bahasa, budaya bahkan agama. Memiliki sikap tidak membeda-bedakan dan menganggap bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan dihadapan Tuhan. Sehingga nilai inilah yang kemudian dapat membawa bangsa memiliki rasa persatuan.
4. Sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Hakikat sila ini yaitu mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Nilai-nilai etika wajib dikedepankan karena berkaitan dengan sikap mampu untuk berbesar hati dalam menerima pendapat orang lain yang berbeda, dan mampu menerima jika hasil musyawarah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan
5. Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila ini merupakan suatu perwujudan sistem etika yang tidak hanya terfokus pada kewajiban atau tujuan seseorang akan tetapi juga terfokus pada keutamaan. Sila pertama sampai sila keempat tidak akan ada artinya jika tidak ada sila kelima, yaitu keadilan sebagai focus utama dari falsafah Negara Indonesia. Sehingga keadilan tidak boleh diabaikan, karena sebagai inti dari Pancasila.

7) Tugas belajar lanjutan

Anda dipersilahkan untuk menggali sumber dan informasi terkait dengan hal-hal berikut, Mendiskusikannya dengan teman, menganalisis dan menuliskan laporannya secara tertulis:

1. Menelusuri konsep dan pengertian etika, etiket dan kode etik dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengidentifikasi konsep dan pengertian Eudaemonisme, Hedonisme, Utilitarianisme dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda.
3. Memahami konsep dan pengertian Pancasila sebagai sistem etika sebagaimana yang terkandung dalam sila 1, 2, 3, 4, dan 5 sehingga penamaan etika Pancasila sebagai Common Denominator dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah-filosofis.
4. Kasus pemberian hadiah yang mengandung unsur gratifikasi dan pemberian hadiah tulus.
5. Membangun argumen dan menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan atas Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi.

8) Soal untuk pengayaan

1. Jelaskan konsep Pancasila sebagai dasar sistem etika !
2. Jelaskan apa perbedaan nilai, etika, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sertakan dengan contoh !
3. Jelaskan dengan contoh bagaimana beretika politik yang baik !
4. Mengapa pendidikan karakter perlu diajarkan di satuan pendidikan nasional korelasikan dengan keberlangsungan kehidupan berbangsa ?
5. Bagaimana pandangan anda mengenai norma kesopanan generasi muda pada saat ini ?

DAFTAR PUSTAKA

- Gufron, Iffan Ahmad. "Menjadi Manusia Baik dalam Perspektif Etika Keutamaan." *Jurnal Yaqzhan*. 2, No. 1 (2016)
- Huda, Ni'matul. "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarchy Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum* 13, No. 1 (2006)
- Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. "Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.". *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*. (2016)
- Ratnawati, Tina dan Sonny Keraf. *Pengertian dan Teori Etika*. 2014 <http://repository.ut.ac.id/4320/1/PWKL4302-M1.pdf> diakses tanggal 10 Agustus 2018
- Reksiana. "Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika". *Jurnal Thaqafiyat* 10, No. 1 (2018)
- Ristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pendidikan pancasila untuk Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Republik Indonesia. 2016.
- Ruman, Yustinus Suhardi. "Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis." *Jurnal Hukum Prioris* 2, No. 2 (2009)
- Suroso. "Sosialisasi Nilai Pancasila." *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*. 2 (2011)
- Thamrin, Husni. "Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable)." *Jurnal Khutubkhanah*. 16, No. 1, (2013)
- Widy, Hastanti. *Etika Keutamaan Pancasila*. 2015 https://www.researchgate.net/publication/287686709_ETIKA_KEUTAMAAN_PANCASILA diakses tanggal 10 Agustus 2018
- Wilujeng, Sri Rahayu. "Filsafat, Etika dan Ilmu: Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan." (2011) <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/5313/4774> diakses tanggal 10 Agustus 2018
- http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Nilai%20dan%20Norma_0.pdf diakses tanggal 10 Agustus 2018